

**ANALISIS TEMUAN TERKAIT PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK  
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN ANGGARAN 2019-2023**



**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : TINAHI NIAMA**

**NIM : 126232025**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**JAKARTA**

**2024**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS TEMUAN TERKAIT PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK  
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2019-  
2023**



**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : TINAHI NIAMA**

**NIM : 126232025**

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT UNTUK KELULUSAN PADA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**JAKARTA**

**2024**

**ANALISIS TEMUAN TERKAIT PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK  
PADA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2019-  
2023**

**Laporan Tugas Akhir**

**Disusun Oleh:**



**Tinahi Niama**

---

**126232025**

**Disetujui Oleh: Pembimbing**



**Susanto, SE.,M.M.,Ak.,CPA, CPMA,CA,ACPA**

---

## **ABSTRAK**

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sumber penting pendapatan negara yang memerlukan pengelolaan yang baik. Pada periode Tahun Anggaran 2019-2023, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara konsisten mengungkapkan temuan terkait pengelolaan PNBP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis temuan-temuan tersebut dengan fokus pada frekuensi, penyebab, serta perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi terkait PNBP. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi akar masalah dalam pengelolaan PNBP di BPOM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan yang berulang sebagian besar berkaitan dengan ketidakpatuhan administratif dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal, yang menyebabkan pengelolaan PNBP belum optimal.

**Kata Kunci:** Pendapatan Negara Bukan Pajak, Laporan Hasil Pemeriksaan, Badan Pengawas Obat dan Makanan.

## **ABSTRACT**

*Non-Tax State Revenue (PNBP) is a critical source of state income that requires proper management. During the Fiscal Years 2019-2023, the Audit Reports (LHP) on the Financial Statements of the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) consistently revealed findings related to PNBP management. This study aims to analyze these findings, focusing on the frequency, causes, and the progress of follow-up actions on recommendations related to PNBP. Using a qualitative descriptive approach, this study identifies patterns and root causes of issues in BPOM's PNBP management. The results indicate that recurring findings are primarily associated with administrative non-compliance and weaknesses in internal control systems, contributing to the suboptimal management of PNBP.*

**Keywords:** *Non-Tax State Revenue, Audit Reports, National Agency of Drug and Food Control.*

## **KATA PENGANTAR**

Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulisan tugas akhir ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi di Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Susanto, SE.,M.M.,Ak.,CPA, CPMA,CA,ACPA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini;
2. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPA FEB Universitas Tarumanagara, atas kesempatan dan dukungan yang telah diberikan selama masa studi;
3. Seluruh dosen, staf, dan karyawan PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu pengetahuan, fasilitas, dan dukungan selama proses perkuliahan;
4. Seluruh anggota keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat yang tak pernah putus selama penulis menempuh pendidikan;
5. Teman-teman mahasiswa PPA FEB Universitas Tarumanegara Batch 34 yang telah menemani dan memberikan semangat selama perjalanan studi.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 30 November 2024

Tinahi Niama

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penelitian .....	2
1.4 Manfaat Penelitian .....	3
1.5 Sistematika Pembahasan .....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.....	4
2.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak.....	5
BAB III METODE PENELITIAN.....	7
3.1 Jenis dan Metode Penelitian.....	7
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	7
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	8
4.1 Gambaran Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan .....	8
4.2 Hasil dan Pembahasan.....	9
BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....	15
5.1 Simpulan .....	15
5.2 Saran.....	15
DAFTAR PUSTAKA .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Opini BPK atas LK BPOM 10 Tahun Terakhir.....	1
Tabel 2	Jumlah dan Klasifikasi Temuan Pemeriksaan terkait PNBP .....	2
Tabel 3	Rincian Target dan Realisasi PNBP BPOM Periode 2019 - 2023 .....	8
Tabel 4	Opini dan Jumlah Temuan Terkait PNBP .....	9
Tabel 5	Rincian Judul Pemeriksaan terkait PNBP.....	10
Tabel 6	Rekapitulasi Kategorisasi Temuan Pemeriksaan Terkait PNBP .....	11
Tabel 7	Data Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada BPOM.....	12
Tabel 8	Data Pemantauan Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan terkait PNBP pada BPOM.....	13



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi sumber pendapatan negara yang sangat signifikan. Dana yang diperoleh dari PNBP berkontribusi besar dalam pembiayaan beragam aktivitas pemerintah, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan hingga proyek-proyek pembangunan nasional.

PNBP diatur oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 dan peraturan pelaksana lainnya, yang menuntut tata kelola yang akuntabel dan transparan dari setiap instansi pemerintah yang terlibat, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagai lembaga yang berwenang atas pengawasan keamanan obat dan makanan, BPOM memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan PNBP melalui penyediaan pelayanan teknis seperti sertifikasi, pengujian, dan registrasi produk obat dan makanan.

Selama satu dekade terakhir, BPOM telah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan dengan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian ini merupakan indikator dari tata kelola keuangan yang baik, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan. Berikut adalah rekapitulasi opini yang diraih BPOM dalam 10 tahun terakhir.

**Tabel 1 Rekapitulasi Opini BPK atas LK BPOM 10 Tahun Terakhir**

No.	Tahun Anggaran	Opini Laporan Keuangan BPOM
1	2014	WTP
2	2015	WTP
3	2016	WTP
4	2017	WTP
5	2018	WTP
6	2019	WTP
7	2020	WTP
8	2021	WTP
9	2022	WTP
10	2023	WTP

Meskipun capaian WTP ini menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dari BPOM dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, hasil pemeriksaan atas laporan keuangan BPOM selama lima tahun terakhir terus mencatat temuan terkait pengelolaan PNBPN dengan rekapitulasi sebagai berikut.

**Tabel 2 Jumlah dan Klasifikasi Temuan Pemeriksaan terkait PNBPN**

Tahun Anggaran	Jumlah Temuan	Klasifikasi Temuan	
		Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
2019	3	-	3
2020	1	-	1
2021	2	-	2
2022	1	-	1
2023	2	1	1

Klasifikasi temuan pada tabel di atas menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku dan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal pada pengelolaan PNBPN. Berdasarkan uraian tersebut, penulis bertujuan untuk melakukan studi kasus dengan judul Analisis Temuan Terkait Pendapatan Negara Bukan Pajak Pada Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun Anggaran 2019-2023.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang pada subbab sebelumnya, penelitian ini akan secara khusus menganalisis permasalahan, yaitu:

1. Apa saja yang menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan PNBPN pada BPOM?
2. Bagaimana perkembangan penyelesaian temuan pemeriksaan terkait PNBPN pada BPOM?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi kondisi dan permasalahan pengelolaan PNBPN pada BPOM; dan
2. Mengetahui progress tindak lanjut penyelesaian atas temuan pemeriksaan terkait PNBPN pada BPOM.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menjadi media pembelajaran dalam bidang *audit assurance*;
2. Menjadi media pengembangan atas penelitian sejenis di kemudian hari;
3. Meningkatkan pengelolaan PNPB kepada pihak yang membutuhkan.

#### **1.5 Sistematika Pembahasan**

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

BAB III : METODE PENELITIAN

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2024. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024. Jakarta: BPK RI.
- Dinarjito, Agung. 2017. Analisis Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga. Jurnal Info Artha Vol. 1 No. 1. <https://doi.org/10.31092/jia.v1i1.5>.
- Fitriya. 2024. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Objeknya. <https://klikpajak.id/blog/penerimaan-negara-bukan-pajak>.
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Sougi, Toufan, dkk. 2018. Analisis Temuan Pemeriksaan Bpk-Ri Atas Aset Tetap Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Tahun Anggaran 2014 – 2016. Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja. <https://doi.org/10.22437/jaku.v3i3.5386>.
- Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.